



**BADAN KESATUAN
BANGSA &
POLITIK
KAB.BONE**

**RENJA
2023**



ALAMAT

Jl. A. Mappanyukki

E-MAIL

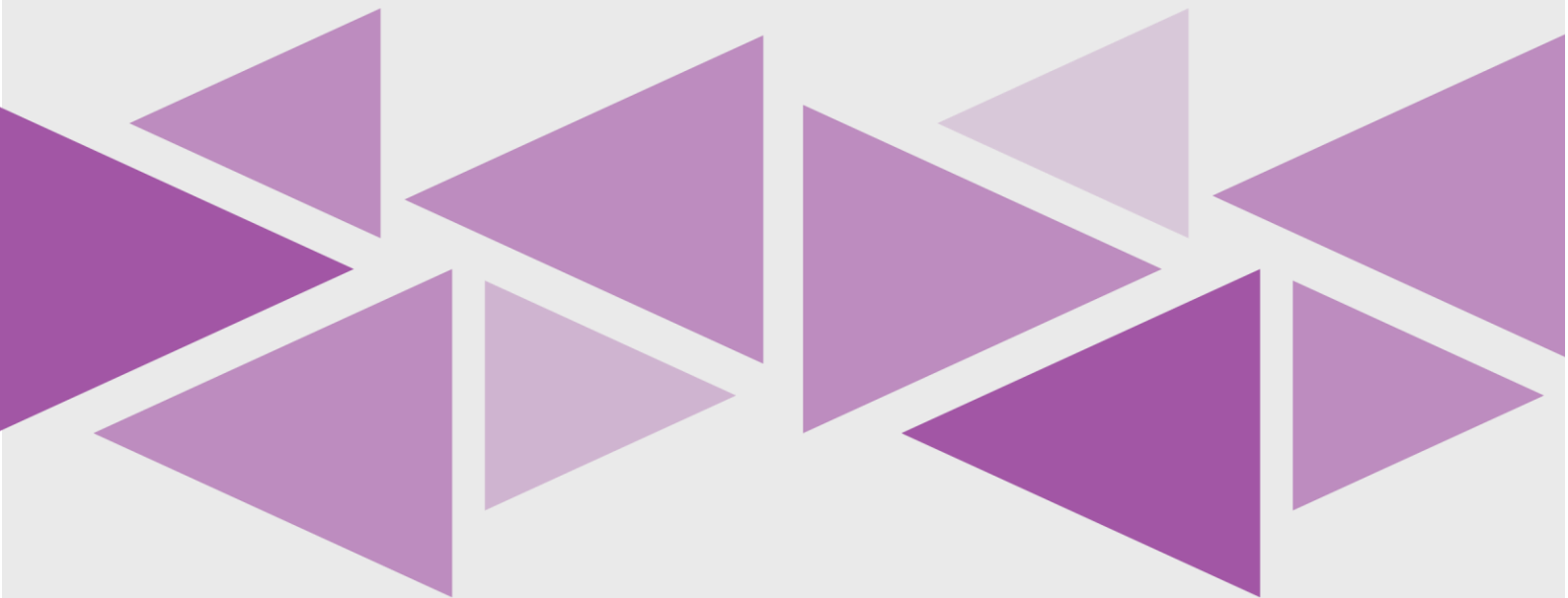
bakesbangpol.bone@gmail.com



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG RANCANGAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

2023

RENJA BAKESBANGPOL KAB. BONE





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Kesbangpol baik dalam merumuskan kegiatan maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Bone, 25 Juli 2022



Dr. H. A. SUMARDI SUAIB, MM

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA,
NIP : 19671109 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah	27
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kab Bone	27
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KESBANGPOL	33
BAB V : PENUTUP	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone 2023 ; a. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ; c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah ; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone. Tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2014 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan Badan KesbangdanPolitk di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;

1. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BAGSA DAN POLITK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada Tahun 2022 ditetapkan 8 (delapan) program dan 27 (dua puluh Tujuh) kegiatan urusan wajib. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone selama tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 10.495.206.955,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp 10.295.018.084,- terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dengan capaian kinerja fisik sebesar 87,8% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,30%.

NO	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				KEUANGAN	%
	5	BELANJA	9,390,377,756	8,385,743,161	89
1	801.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,399,647,151	4,081,505,206	93
1.1	801.01.201	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20,237,000	18,026,300	89
1.1.1	801.01.201.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3,631,000	3,521,000	97
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	226,000	136,000	60
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,860,000	99
	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	525,000	525,000	100
1.1.2	801.01.201.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1,150,500	1,150,500	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	190,500	190,500	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960,000	960,000	100
1.1.3	801.01.201.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	627,750	627,050	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	147,750	147,050	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000	480,000	100
1.1.4	801.01.201.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	627,750	627,750	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	147,750	147,750	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000	480,000	100
1.1.5	801.01.201.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14,200,000	12,100,000	85
	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	4,200,000	2,100,000	50
	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa komputer jaringan	10,000,000	10,000,000	0
1.2	801.01.202	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,509,010,001	2,588,150,580	103
1.2.1	801.01.202.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2,509,010,001	2,588,150,580	103
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,256,384,220	1,305,030,400	104
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	104,036,930	112,879,004	108
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150,403,000	172,490,000	115
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15,620,000	16,500,000	106
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,022,000	21,185,000	92
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63,309,560	65,902,200	104
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	2,364,780	2,700,082	114
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78,193	17,633	23
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	57,584,140	55,970,056	97
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,802,110	2,690,871	96
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8,406,290	8,072,544	96
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	403,992,650	403,641,896	100
	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	67,121,494	67,348,082	100
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	353,884,634	353,722,812	100
1.3	801.01.205	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23,000,000	17,000,000	74
1.3.1	801.01.205.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23,000,000	17,000,000	74
	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23,000,000	17,000,000	74
1.4	801.01.206	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	712,636,350	595,136,872	84
1.4.1	801.01.206.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	118,212,000	68,014,200	58
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43,164,500	42,937,700	99
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	31,247,500	7,844,500	25
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,650,000	3,600,000	99
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	40,150,000	13,632,000	34
1.4.2	801.01.206.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	154,518,200	120,016,700	78
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	124,518,200	111,378,700	89
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30,000,000	8,638,000	29
1.4.3	801.01.206.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40,716,150	29,487,900	72
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	40,716,150	29,487,900	72
1.4.4	801.01.206.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43,800,000	32,370,000	74
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	43,800,000	32,370,000	74
1.4.5	801.01.206.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	355,390,000	345,248,072	97
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	267,600,000	267,105,872	100
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,100,000	20,500,000	68
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,690,000	57,642,200	100
1.5	801.01.207	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	307,050,000	280,230,000	91
1.5.1	801.01.207.05	PENGADAAN MEBEL	53,000,000	53,000,000	100
	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Penyimpan Perlengkapan Kantor	40,000,000	40,000,000	100
	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13,000,000	13,000,000	100
1.5.2	801.01.207.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	254,050,000	227,230,000	89
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16,800,000	345,000	2
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3,050,000	1,425,000	47
	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	10,950,000	6,210,000	57
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17,500,000	13,500,000	77
	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	50,700,000	50,700,000	100
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	63,000,000	63,000,000	100
	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer unit lainnya	38,200,000	38,200,000	100
	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53,850,000	53,850,000	100

1.6	801.01.208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380,232,000	348,236,027	92
1.6.1	801.01.208.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30,000,000	15,736,512	52
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30,000,000	15,736,512	52
1.6.2	801.01.208.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	350,232,000	332,499,515	95
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	67,680,000	62,550,000	92
	5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7,200,000	7,200,000	100
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	102,600,000	102,600,000	100
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105,000,000	95,550,000	91
	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	39,600,000	37,800,000	95
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,750,000	3,750,000	100
	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19,380,000	19,380,000	100
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	5,022,000	3,669,515	73
1.7	801.01.209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	447,481,800	234,725,427	52
1.7.1	801.01.209.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	130,460,800	112,225,427	86
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49,900,800	41,329,640	83
	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor kendaraan Bermotor Penumpang	66,000,000	65,314,207	99
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14,560,000	5,581,580	38
1.7.2	801.01.209.09	PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	317,021,000	122,500,000	39
	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	5,000,000	5,000,000	100
	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	5,000,000	5,000,000	100
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	307,021,000	112,500,000	37
2	801.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	237,800,250	207,572,450	87
2.1	801.02.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	237,800,250	207,572,450	87
2.1.1	801.02.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN , BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMABURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	60,650,400	55,229,000	91
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57,000	0	0
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,571,400	1,571,400	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,074,000	13,074,000	100
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Perubahan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,400,000	6,400,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,944,000	13,428,800	96
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,000,000	16,350,000	86
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,604,000	4,404,800	67
2.1.2	801.02.201.02	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	84,348,000	81,886,450	97
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48,000	0	0
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,864,000	2,685,650	94
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,848,000	16,800,000	100
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Perubahan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10,100,000	10,000,000	99
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,888,000	26,700,800	96
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,600,000	25,700,000	97
2.1.3	801.02.201.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	39,677,850	30,635,000	77
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,846,500	0	0
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	420,000	0	0
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,655,350	350,000	21
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,568,000	9,600,000	83
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,234,000	13,459,800	88
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	3,900,000	100
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,054,000	3,325,200	66
2.1.4	801.02.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	53,124,000	39,822,000	75
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196,000	0	0
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,992,000	4,992,000	100
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22,400,000	22,400,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,234,000	9,030,000	59

	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,000,000	3,400,000	49
	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,302,000	0	0
3	801.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,429,273,805	1,417,673,355	99
	801.03.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1,429,273,805	1,417,673,355	99
	801.03.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	107,187,600	101,322,600	95
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	1,253,600	1,253,600	100
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	546,000	546,000	0
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	2,130,000	2,130,000	100
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	792,000	792,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,602,000	16,602,000	100
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19,800,000	19,800,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,064,000	30,199,000	84
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	6,000,000	100
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24,000,000	24,000,000	100
	801.03.201.02	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK,PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1,303,675,555	1,300,444,155	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	189,000	189,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,760,000	5,760,000	100
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,000,000	30,000,000	100
	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	189,000	189,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,670,000	32,238,600	99
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,900,000	100,000	3
	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,231,967,555	1,231,967,555	100
	801.03.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI	18,410,650	15,906,600	86
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	510,650	0	0
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,900,000	12,806,600	99
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	3,100,000	62
	801.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	789,035,600	591,418,800	75
	801.04.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	789,035,600	591,418,800	75
	801.04.201.05	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	789,035,600	591,418,800	75
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,409,000	1,386,000	98
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	546,000	546,000	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	484,600	300,000	62
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	1,056,000	1,056,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	8,250,000	100
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,700,000	7,100,000	92
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,240,000	28,487,600	97
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,350,000	12,250,000	71
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	12,043,200	67
	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	705,000,000	520,000,000	74
	801.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	194,891,950	178,034,650	91
	801.05.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	194,891,950	178,034,650	91
	801.05.201.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	172,613,250	158,850,250	92
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	593,250	593,250	100

	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,800,000	4,800,000	100
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10,500,000	10,500,000	100
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75,000,000	75,000,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,120,000	67,957,000	94
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	0	0
	801.05.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	22,278,700	19,184,400	86
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	210,700	0	0
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	768,000	0	0
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,900,000	10,784,400	84
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000	8,400,000	100
	801.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,339,729,000	1,909,538,700	82
	801.06.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,339,729,000	1,909,538,700	82
	801.06.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING,KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	249,296,800	201,288,000	81
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,042,000	400,000	38
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,690,000	920,000	54
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,216,800	6,305,000	87
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	1,980,000	1,980,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66,240,000	64,800,000	98
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	50,000,000	50,000,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,128,000	24,583,000	48
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70,000,000	52,300,000	75
	801.06.201.02	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING,KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	379,496,350	251,603,200	66
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	220,000	220,000	100
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,260,000	350,000	28
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,900,350	980,000	10
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95,040,000	35,956,000	38
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	20,600,000	0	0
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	172,200,000	172,200,000	100
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,776,000	38,697,200	69
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,500,000	3,200,000	13
	801.06.201.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING,TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	116,586,000	25,604,850	22
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180,000	180,000	100
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untukkegiatan kantor-kertas dan Cover	700,000	350,000	50
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,946,000	199,850	10
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,472,000	13,320,000	57
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,888,000	9,455,000	34
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,400,000	2,100,000	3
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,000,000	0	0
	801.06.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING,TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	96,391,300	12,880,900	13
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,007,300	100,100	10
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,848,000	3,400,000	20
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,536,000	9,380,800	29
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,000,000	0	0
	801.06.201.06	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,497,958,550	1,418,161,750	95
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20,922,550	12,404,750	59
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168,480,000	145,032,000	86
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,212,200,000	1,212,200,000	100

	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,056,000	44,899,800	83
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,400,000	300,000	1
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,900,000	3,325,200	17
		JUMLAH	9,390,377,756	8,385,743,161	89

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai sebagai indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Disamping itu Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, (Tabel TC.30) sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun 2018-2023						Rasio Capaian Tahun 2018-2023					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif				100%	100%	25%	25%	47%	57	100%	100%	25%	25%	47%	61	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase orpol yang Berpartisipasi Aktif		□		100%	100%	80%	80%	100%	100	100%	100%	80%	80%	100%	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif		□		100%	100%	80%	80%	100%	100	100%	100%	80%	80%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Pelatihan Bela Negara		□		100%	100%	4,5	5,6	6,7	8,8	100%	100%	4,5	5,6	6,7	5,7	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani		□		100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Predikat Hasil		□	□	C	C	CC	CC	B	BB	CC	CC	CC	CC	BB	BB	C	B	B	B	BB	BB

	Evaluasi SAKIP Oleh APIP																				
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategis yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan. Secara rinci, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone diuraikan dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
2. Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
3. Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

- ♦ Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan tools pengukuran kinerja
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA
- ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal
- ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga Pendidikan politik tidak merata

Dampak

- Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
- Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terpecah.
- Isu terorisme yang terkait dengan masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan/kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

2. Masih terdapat penyakit masyarakat (pekat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan narkoba, illegal logging, pengguna minuman keras(miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Belum optimalnya nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi yang tidak terbendung.
4. Munculnya isu- isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
5. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik

Peluang

1. Perkembangan politik yang semakin demokratis, memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, melalui LSM/ormas dan partisipasi masyarakat
2. Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri yang kondusif membawa ketenteraman dalam masyarakat
3. Pendidikan Politik Masyarakat yang cukup baik, meningkat mendorong peningkatan minat masyarakat menjadi anggota legislatif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC – 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec . TR Barat	Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100 Persen	4.265.482.468	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec . TR Barat	Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100 Persen	5.049.816.732	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	100 Persen	6.037.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	100 Persen	6.942.550	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	3.631.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	4.175.650	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Dokumen	2.406.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Dokumen	2.766.900	
	Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.463.520.684	Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.833.048.787	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec . TR Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Beserta Tambahan Penghasilan Bulanan Bagi ASN	1 Tahun	2.459.320.684	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec . TR Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Beserta Tambahan Penghasilan Bulanan Bagi ASN	1 Tahun	2.828.218.787	
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Realisasi yang Tersusun	5 Dokumen	4.200.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Realisasi yang Tersusun	5 Dokumen	4.830.000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Administrasi Umum	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.695.924.784	Administrasi Umum	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.094.825.395	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	24 Rekening	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	24 Rekening	34.500.000	
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kamntor	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	40 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kamntor	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	40 Unit	16.100.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Keuangan Selama Setahun	444 Kali	344.880.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Keuangan Selama Setahun	444 Kali	396.612.000	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	1405 Paket	100.236.480	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	1405 Paket	256.409.060	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang &Cetakan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	1 Tahun	46.983.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang &Cetakan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	1 Tahun	54.031.485	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec . TR Barat	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	120 Kali	43.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec . TR Barat	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	120 Kali	50.370.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian bagi Pegawai dan Tamu Sesuai Rencana Kebutuhan	1 Tahun	84.864.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian bagi Pegawai dan Tamu Sesuai Rencana Kebutuhan	1 Tahun	97.593.600	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	100 Kegiatan	646.995.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	100 Kegiatan	646.995.000	
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Peangadaan Peralatan Kantor	4 Paket	94.625.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Peangadaan Peralatan Kantor	4 Paket	150.075.000	
14	Pengadaan Mebeleur	Kec . TR Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur	38 Unit	76.540.404	Pengadaan Mebeleur	Kec . TR Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur	38 Unit	50.140.000	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	115.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kec . TR Barat	Junmlah Pemeloiharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	113.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kec . TR Barat	Junmlah Pemeloiharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	129.950.000	
	Adminstrasi Kepegawaian	Kec . TR	Persentase Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	100 Persen	100.000.000	Adminstrasi Kepegawaian	Kec . TR	Persentase Aparat Perangkat Daerah yang	100 Persen	115.000.000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

		Barat	dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan				Barat	Berkinerja Baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan			
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec . TR Barat	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat PIM	4 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec . TR Barat	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat PIM	4 Orang	100.000.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kec . TR Barat	Presentase peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan (%)	100 Persen	325.693.200	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100 Persen	374.547.180	
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kec . TR Barat	Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen	325.693.200	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kec . TR Barat	Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen	374.547.180	
18	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan	68.309.800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan	78.556.270	
19	Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah PD yang Terlibat di Dalam Kegiatan Revolusi Mental Mabessa	4 PD	81.271.400	Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah PD yang Terlibat di Dalam Kegiatan Revolusi Mental Mabessa	4 PD	93.462.110	
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pendidikan Kesadaran Bela Negara	350 Orang	133.250.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pendidikan Kesadaran Bela Negara	350 Orang	153.237.500	
21	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Etnis yang Tergabung Dalam Forum Pembauran Kebangsaan	4 Kegiatan	42.862.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Etnis yang Tergabung Dalam Forum Pembauran Kebangsaan	4 Kegiatan	42.862.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Kec . TR Barat	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100 Persen	201.699.300	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kec . TR Barat	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100 Persen	231.954.195	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	SERTA BUDAYA POLITIK										
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	201.699.300				100 Persen	231.954.195	
22	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pendidikan Kepada Masyarakat	350 Orang	83.829.200	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pendidikan Kepada Masyarakat	350 Orang	96.403.580	
23	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Parpol yang Mendapatkan Bantuan	12 Parpol	67.001.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Parpol yang Mendapatkan Bantuan	12 Parpol	77.051.150	
24	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	27 Kecamatan	50.869.100	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	27 Kecamatan	58.499.465	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kec . TR Barat	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100 Persen	58.290.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kec . TR Barat	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100 Persen	67.033.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kec . TR Barat	Prosentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	58.290.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kec . TR Barat	Prosentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	67.033.500	
25	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah LSM dan Ormas yang Terdaftar	2 Ormas	58.290.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah LSM dan Ormas yang Terdaftar	2 Ormas	67.033.500	
V	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kec . TR Barat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100 Persen	93.447.000	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kec . TR Barat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100 Persen	107.464.050	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	93.447.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	107.464.050	
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NARKotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Anggota Yang Tergabung Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	71.772.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NARKotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Anggota Yang Tergabung Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	82.537.800	
27	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NARKotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	6 Laporan	21.675.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NARKotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	6 Laporan	24.926.250	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kec . TR Barat	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	100 Persen	2.414.708.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kec . TR Barat	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	100 Persen	2.776.914.200	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	2.414.708.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	2.776.914.200	
28	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Tenaga Pengendali KEwaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	4 Kegiatan	291.296.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Tenaga Pengendali KEwaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	4 Kegiatan	291.296.000	
29	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Simulasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial yang Terlaksana	27 Kecamatan	345.602.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Simulasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial yang Terlaksana	27 Kecamatan	397.442.300	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Kerjasama dan SINergitas antar FORKOPIMDA	12 Kali	1.553.694.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Kerjasama dan SINergitas antar FORKOPIMDA	12 Kali	1.786.748.100	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah					Konflik di Daerah					
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba serta Gugus Gerakan Bone Melayani Tertib dan Bersih	27 Kecamatan	112.694.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba serta Gugus Gerakan Bone Melayani Tertib dan Bersih	27Kecamatan	129.598.100	
32	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Orang Asing	27 Kecamatan	111.422.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Orang Asing	27 Kecamatan	128.135.300	
JUMLAH					7.359.319.968					19.725.221.677	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain daripada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait kebijakan nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Kab. Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%)
- Persentase Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan
- Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif
- Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/ORMAS yang Bersertifikat Pelatihan Bela Negara

- Persentase Konflik sosial yang tertangani
- Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	IndikatorTujuan/Sasaran
1	2	4
I	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	1. Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%) 2. Persentase Orpol yang Berpartisipasi Aktif 3. Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif 4. Persentase Apratur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Pelatihan Bela Negara
II	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Konflik Sosial yang tertangani
III	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih menitik beratkan pada hal peningkatan ketertiban dan kenyamanan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Basional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :

NO.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

			Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas, Evaluasi dan Mendiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyedian Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyedian Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2023 merencanakan 6 (Enam) Program serta 11 (Sebelas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2) Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari 3 Sub Kegiatan
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
 - 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasana Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) elaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan disertakan lampiran yang ada dibawah ini:

Tabel 4.2
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

SKPD : 8-01.0-0.0-0.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8									14.444.899.523				11.218.849.117
8	01								14.444.899.523				11.218.849.117
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	4.084.179.363			100 Persen	5.052.095.158
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	17.632.500			100 Persen	13.625.449
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	4.352.500	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	4.832.861
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	1.730.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.531.316.
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	1.040.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	835.536
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	980.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	835.536

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

9.530.000	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Laporan		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5.590.200
2.694.656.633	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.742.931.968			3.213.714.636
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	24 Orang/Bulan	2.742.931.968	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Bulan	3.213.714.636
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.576.000			34.485.000
8	01	01	2.05	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tanete Riattang Barat	57 Paket	15.576.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57 lembar	34.485.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				704.566.400			921.471.535
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	175.255.850	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	282.160.263
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	268.848.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	73.325.120
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	36.576.550	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	39.271.942

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	7.680.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	52.998.000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	600 Laporan	216.206.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Kali	473.716.210
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.629.400				523.218.762
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	14.399.400	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Rekening	39.930.000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	376.230.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	483.288.762
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.280.000				345.579.776
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Tanete Riattang Barat	18 Unit	66.750.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	172.789.888
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanete Riattang Barat	208 Unit	25.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Paket	172.789.888
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			90 Persen	278.108.700				581.759.954

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			90 Persen	278.108.700				581.759.954
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah DokumenProgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	61.225.700	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	90.920.211
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	73.709.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	108.172.100
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Orang	80.490.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	341.890.643
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	62.684.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	40.777.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			100 Persen	1.448.319.555			100 Persen	1.783.987.767

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			100 Persen	1.448.319.555			100 Persen	1.783.987.767
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	77.235.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	126.853.375
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	1.326.942.555	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	1.605.600.492

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	44.142.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	51.533.900
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			85 Persen	2.168.130.000			100 Persen	830.687.458
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			85 Persen	2.168.130.000			100 Persen	830.687.458
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	2.168.130.000	Pajak Daerah		1 laporan	830.687.458
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			90 Persen	108.883.550			100 Persen	153.747.000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			90 Persen	108.883.550			100 Persen	153.747.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Orang	84.232.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	150.040.000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 laporan	24.651.550	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	3.707.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			90 Persen	6.477.841.450			100 Persen	2.816.571.780
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			90 Persen	6.477.841.450			100 Persen	2.816.571.780
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	245.874.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	90.750.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	228.224.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	341.148.940
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Orang	5.033.799.450	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	332.750.000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	969.944.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	2.051.922.840

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2023.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2023, Renja Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas ,harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan.
6. Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator prosentase lembaga kemaanan yang berperan aktif dan Peningkatan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memberikan kemudahan kepada Aparat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam hal ini semua stakeholder terkait dan para FORKOPIMDA dalam kegiatan penyiapan tenaga pengendali kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, ini merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan masyarakat dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Bone dalam menjaga NKRI.

CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
BAKESBANGPOL KAB. BONE

VISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)												
MISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajuan masyarakat						Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)						
TUJUAN - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum 2. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat						Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN						
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan					Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						
INDIKATOR TUJUAN	Mewujudkan Bone aman, damai dan demokratis						Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP						
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol					Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Meningkatnya Antipati konflik untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik					
INDIKATOR SASARAN	1. % Ormas dan LSM yang berpartisipasi aktif 2. Cakupan Orpol yang berpartisipasi aktif					1. Cakupan Lembaga Keagamaan yang berperan aktif 2. Prosentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat pelatihan Bela Negara	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP					
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	BAKESBANGPOL												
PROGRAM	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Partisipasi Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan	Moringkatnya Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Bakesbangpol							
INDIKATOR PROGRAM	% Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	% Peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)							
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas		Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik	SEKRETARIS							
KEGIATAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN KEGIATAN	Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Terciptanya ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik
INDIKATOR KEGIATAN	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	% Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Laporan Periodik Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	% Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	% Laporan Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	% Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas		Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik	SEKRETARIS						

KEGIATAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kebutuhan Umot Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kebutuhan Umot Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Terrealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Juran Jaminan/Kurans per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakalan Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kebutuhan Umot Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Juran Jaminan/Kurans per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kebutuhan Umot Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kebutuhan Umot Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah		Terlaksananya Disabilitas/bekas korban tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan

INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Dilat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/bekas sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Lporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah		Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan			
SASARAN SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Lporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah		Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan			
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan			
SUB KEGIATAN 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kiblat Realisasi Kinerja SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kearsama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Evaluasi & Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			

INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengkaderan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengkaderan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Berekat Tunggal Ika dan Segrah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Ketahanan Intelektual, Pemerintahan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perilaku Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Terusun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diadani/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN 6					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
SASARAN SUB KEGIATAN 6					Tersedianya Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6					Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		

SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut					Kasubag. Umum & Kepegawaian	Kasubag. Keuangan	Kasubag Umum & Kepegawaian					
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Mahasiswa, Pelajar dan Tokoh Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan / LSM, Pasar			Pelajar, ASN dan Tokoh Masyarakat	Mahasiswa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Keuangan Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Dislat & Bimtek Bagi Pegawai Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Umum Bakesbangpol	Barang Milik Daerah Pada Bakesbangpol	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Bakesbangpol	Barang Milik Daerah Pada Bakesbangpol
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. DPRD Kab. Bone 6. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan 7. KPU 8. BAWASLU	1. Masyarakat Umum 2. Bupati & Wakil Bupati Bone 3. Sekretaris Daerah Kab. Bone 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 5. Pemerintah Desa 6. DPRD Kab. Bone 7. KEMENAG 8. BNN			1. Bupati & Wakil Bupati 2. Forkopimcam 3. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. Etnis 6. Kementerian Terkait	1. Forkopimda 2. Forkopimcam 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Kementerian Terkait 5. Aparat Penegak Hukum (TNL, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPK-RI 9. Kementerian Terkait	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. DISKOMINFO Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. LKPB Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. LKPB Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. LKPB Kab. Bone 5. BPKP 6. BPK-RI 7. Penyedia Barang/Jasa	